

## Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0

Nieke Masruchiyah<sup>1\*</sup>, Antonia Junianty Laratmase<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Borobudur, Jakarta Indonesia

<sup>2</sup>PGSD, STKIP Arrahmaniyah Depok

<p><i>Received</i> 17 May 2023</p> <p><i>Revised</i> 17 May 2023</p> <p><i>Accepted</i> 20 July 2023</p> <p><i>*Correspondence</i> Nieke Email:nieke69ms@gmail.com</p>	<p><b>Abstract</b></p> <p><i>The world conference on Women in 1995 adopted the Beijing Platform for Action, in which governments agreed to implement gender mainstreaming. Other UN conference also acknowledge the importance of adapting a gender specific approach to implementing policies: gender equality has been identified as one of MDGs and designed as a crosscutting theme for work of the commission on sustainable organizations, national government, and most civil society groups still fail to integrate gender perspective adequately into their policies and their action. Gender equality is a right. Women are not only more affected by economic crisis and lack of health care, to climate change, violence against women and escalating conflicts, but also possess ideas and leadership to solve them. The 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by world leaders in 2015. Achieving gender equality and women's empowerment is integral to each of the 17 goals in economic globalization era. Women must not miss the jobs of the future. This is the central message of a new study on women in science released by UNESCO (11/06/2021). The digital revolution will need to be inclusive. A fundamental transformation is under way in the workforce. The Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0, is disrupting industries and the labor market, as cyber physical systems proliferate and become more sophisticated. The irony is that the fields most relevant to Industry 4.0 are the very ones where women remain underrepresented in most countries, namely IT, computing, physics, mathematics and engineering. Japan is hoping that the centerpiece of its new growth strategy, Society 5.0, will enable society to adapt to a shrinking, ageing population through widespread use of AI and other digital technologies in industry, agriculture and the services sector.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>women empowerment</i></p>
--	---

### PENDAHULUAN

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya ditujukan kepada seluruh warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Konsep pembangunan berkelanjutan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyasikan antara sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan baik

pada saat ini maupun pada masa mendatang. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah pemenuhan

kebutuhannya tanpa menghambat perkembangan generasi selanjutnya untuk melakukan hal yang sama. Berdasarkan situs resmi otoritas jasa keuangan (OJK) tujuan pembangunan berkelanjutan disebut juga dengan *sustainable development goals* (SDGs). Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) menjadi agenda internasional. SDGs disusun oleh PBB dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi seluruh dunia. Agenda tersebut untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu (Wahyudi, Azwari, Alfajr, & DhitaSeptiani, 2018): (a) Tanpa kemiskinan, mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat. (b) Tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan; (c) Kehidupan sehat dan sejahtera, menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia; (d) Pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang; (e) Kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan

memberdayakan perempuan (Anthony & Patra, 2022); (f) Air bersih dan sanitasi layak, menjamin akses air dan sanitasi untuk semua; (g) Energi bersih dan terjangkau, memastikan akses energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern; (h) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, serta lapangan pekerjaan yang layak untuk semua; (i) Industri, inovasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi (Suswanto, 2018); (j) Berkurangnya kesenjangan, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara; (k) Kota dan komunikasi berkelanjutan, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan; (l) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; (m) Penanganan perubahan iklim, mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya (Jayanto, Zid, & Dewi, 2018); (n) Ekosistem laut, perlindungan dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan; (o) Ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan kepunahan keragaman hayati (Wulansari, Darumurti, & Eldo,

2017); (p) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif; (q) Kemitraan untuk mencapai tujuan, menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan (Cop, 2021).

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018): (a) Berkelanjutan ekologis: Menjamin berkelanjutan eksistensi bumi. Hal-hal yang diupayakan adalah: 1) Memelihara integrasi tatanan lingkungan dan keanekaragaman hayati, 2) Memelihara integrasi tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan bumi tetap terjamin, dan 3) Memelihara keanekaragaman hayati; (b) Berkelanjutan ekonomi (Setianingtyas, Baiquni, & Kurniawan, 2019): Pembangunan memiliki dua hal utama, yaitu: 1) Ekonomi makro. Menjamin ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. 2) Ekonomi sektoral. Mencapainya sumber daya alam di mana nilai ekonominya dapat dihitung sebagai kapital dalam rangka akunting ekonomi; (c) Berkelanjutan sosial budaya: Berkelanjutan sosial budaya meliputi (Ramadhan, 2013): 1) Stabilitas penduduk, 2) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 3) Mempertahankan

keanekaragaman budaya, 4) Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan; (d) Berkelanjutan politik: Tujuan dari pembangunan berkelanjutan politik adalah: 1) Respek pada human rights, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik. 2) Demokrasi, yakni memastikan proses demokrasi secara transparan dan bertanggung jawab; (e) Berkelanjutan pertahanan dan keamanan: Pada aspek ini, berhasil atau tidaknya pembangunan berkelanjutan dilihat dari kapabilitas menghadapi berbagai macam tantangan dan gangguan, secara langsung dan tidak langsung, dan mengatasinya dengan baik (Hidayat, 2017).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil oleh peneliti secara langsung melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari informan. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan memanfaatkan data-data yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dapat berbentuk laporan, buku, media

cetak, jurnal maupun data yang didapat melalui internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemberdayaan masyarakat tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Zubaedi, 2013). Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat, apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (*beneficiaries*) atau obyek saja. Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan kaum perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun. Pemberdayaan

perempuan penting dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga kaum perempuan dapat ikut berpartisipasi serta berkippa dalam semua lini pembangunan di Indonesia termasuk dalam pembangunan ekonomi.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini membuat perempuan kian rentan dan ketimpangan gender pun semakin tajam terlebih pada sosial ekonomi. Mulai dari mengalami kekerasan dan diskriminasi, melemahnya kondisi perekonomian hingga hilangnya mata pencaharian. Upaya perlindungan perempuan dan penguatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan sangatlah penting dilakukan, di antaranya yaitu dengan memaksimalkan potensi perempuan untuk menggerakkan roda perekonomian khususnya di era digital ini.

Perempuan memiliki potensi dan berperan sangat besar dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini dapat tercapai jika potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk dapat memberdayakan perempuan, mendorong pelaku usaha perempuan agar dapat terus berinovasi, serta melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip,

kekerasan berbasis gender, dan konstruksi sosial lainnya yang merugikan perempuan.

KTT Perempuan di Beijing menghasilkan Deklarasi Beijing yang antara lain berisi 12 area kritis (*critical areas*) yang merupakan rencana tindak pelibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan. *Critical areas* tersebut meliputi permasalahan 1) kemiskinan, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) kekerasan terhadap perempuan, 5) konflik bersenjata, 6) ekonomi, 7) pengambilan keputusan, 8) mekanisme institusional untuk perempuan, 9) hak asasi perempuan, 10) media massa, 11) pengelolaan lingkungan hidup, dan 12) bidang anak perempuan. Pada KTT Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2002 di Johannesburg, masyarakat dunia mempertegas perspektif Gender dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di bidang ekonomi.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang

disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan (*no poverty*); (2) Tanpa Kelaparan (*zero hunger*); (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*good healthy and well being*); (4) Pendidikan Berkualitas (*quality education*); (5) Kesetaraan Gender (*gender equality*); (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (*clean water and sanitation*); (7) Energi Bersih dan Terjangkau (*affordable and clean energy*); (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*decent work and economic growth*); (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*industry, innovation, and infrastructure*); (10) Berkurangnya Kesenjangan (*reduced inequalities*); (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*sustainable cities and communities*); (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*responsible consumption and production*); (13) Penanganan Perubahan Iklim (*climate action*); (14) Ekosistem Lautan (*life below water*); (15) Ekosistem Daratan (*life on*

*land*); (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*peace, justice, and strong institutions*); (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*partnership for the goals*)(Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak(Manusia, 2017). Semua Target dan tujuan SDGs terbagi menjadi empat pilar, yaitu 1) pilar pembangunan sosial yang meliputi tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5, 2) pilar pembangunan ekonomi meliputi tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17, 3) pilar pembangunan lingkungan meliputi tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15, dan 4) pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi Tujuan 16.

Pada pilar pembangunan sosial, pembagian peran perempuan seringkali menempatkan intensitas perempuan lebih sering bersentuhan langsung dengan obyek yang ditanganinya. Hal ini menyebabkan perempuan menjadi lebih peka dalam tugas mewujudkan manusia seutuhnya

diantaranya mendidik, membina dan melatih anak, generasi muda dan anggota masyarakat, di dalam dan di luar keluarga agar mereka benar-benar menghayati, mengetahui dan melaksanakan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Peranan perempuan dalam keluarga sangat strategis. Tidak dapat disangkal bahwa perempuan dalam kedudukannya sebagai isteri dan ibu dalam keluarga memegang peran penting dalam membekali generasi muda dengan semua persyaratan yang diperlukan untuk mampu menjadi pembangun bangsa. Seorang isteri dan ibu yang sehat fisik dan mentalnya, pandai, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan - teknologi yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, hidup disiplin, tahan menderita, tekun, ulet, sabar adalah modal kekuatan bagi terwujudnya ketahanan nasional yang dimulai dari ketahanan keluarga. Sebaliknya, jika tidak memiliki persyaratan tersebut, maka justru akan menimbulkan penyakit sosial dan masalah baru di dalam masyarakat.

Kesetaraan gender masuk di *Sustainable Development Goals* (SDGs) 5. Sebagai salah satu pilar pembangunan sosial, target kesetaraan gender yang harus

dicapai pada tahun 2030 yaitu harus mengakhiri segala bentuk diskrimasi pada perempuan, menghentikan praktek yang membahayakan perempuan (pernikahan dini, kekerasan seksual), menjamin partisipasi penuh perempuan dalam bidang politik (pemerintah, parlemen), memberi layanan kesehatan yang optimal pada wanita (kesehatan reproduksi, kesehatan dan keselamatan ibu dan anak), memperluas penggunaan dan akses teknologi informasi bagi perempuan.

Kesetaraan gender akan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, yang berarti setiap perempuan berhak untuk berdaya membangun dirinya sendiri. Kesetaraan gender relevan dengan pertumbuhan ekonomi, karena perempuan yang berpendapatan dapat menopang kehidupan, baik kehidupannya sendiri maupun keluarga, akan meningkatkan kegiatan konsumsinya yang juga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara merupakan outcome atau hasil atas kegiatan produksi-konsumsi. Kesetaraan gender menjadi oendorong yang baik dari perspektif peran perempuan dalam kegiatan ekonomi (produksi-konsumsi). Pemberian akses kegiatan yang sama luasnya seperti laki-laki akan menciptakan pertumbuhan

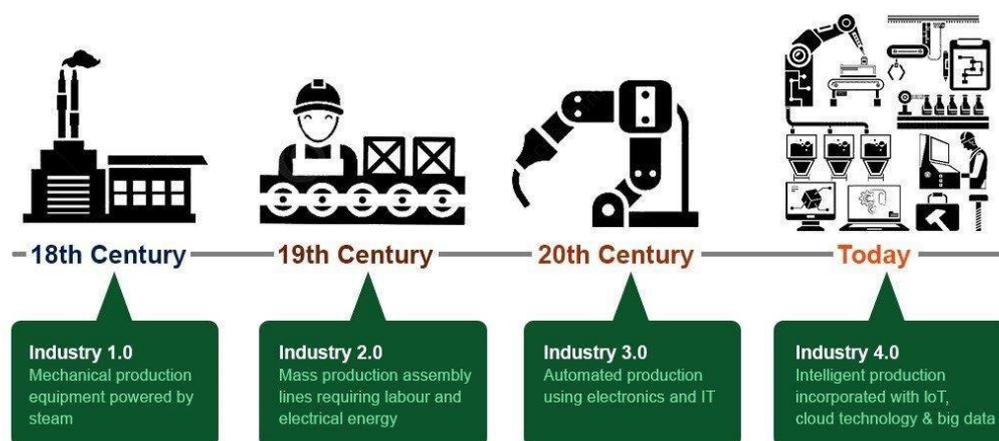
ekonomi yang berkesinambungan. Bagi investor, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat penting untuk menarik kepercayaan mereka untuk berinvestasi pada suatu negara, sebab pertumbuhan ekonomi mencerminkan Bergeraknya sektor-sektor ekonomi suatu negara. Kesetaraan gender ini terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi, karena posisi dan peran yang setara antara laki-laki dan perempuan mendukung jalannya kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Bahwa perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi, sangat berperan penting tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi ketahanan keluarga. Karakter perempuan Indonesia yang dikenal telaten, mandiri, dan pantang menyerah tentu dapat menjadi potensi sebagai modal utama bagi perempuan untuk menjadi wirausaha yang sukses dan berdaya. Apalagi, bagi para perempuan milenial yang umumnya memiliki sifat dinamis, optimis dan penuh semangat kerja. Perempuan milenial inilah yang diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran kreatif dan inovatif, serta menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dalam menyongsong era tatanan kehidupan baru.

Peran perempuan dalam pilar pembangunan ekologis. Sangat jelas

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi religius dan kultural, perempuan sering dipikirkan sebagai dekat dengan alam. Dunia disimbulkan sebagai perempuan ibu. Alam dipersonifikasikan sebagai perempuan, ibu Alam. Secara khusus, pandangan yang paling sering muncul adalah alam sebagai ibu yang memelihara bumi, yang memberi hidup tetapi juga mengambilnya kembali. Fakta sosio kultural memberikan pengaruh terhadap gaya hidup keluarga sehingga membuat perempuan memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan. Pengaruhnya dalam mendidik keluarga dapat mengarahkan gaya hidup berwawasan lingkungan. Perempuan mampu menggerakkan masyarakat sekitar untuk membantu pelestarian lingkungan di lapangan secara praktis dan konkrit. Kedekatannya dengan lingkungan membuat kelompok perempuan menjadi garda terdepan dalam menjaga pelestarian lingkungan dan sebagai water di tingkat akar rumput. Pada pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah

terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Revolusi industri 4.0 ini menekankan pada digitalisasi. Era ini menuntut konektivitas di segala hal (*Internet of Thing*), juga diyakini dapat membawa perubahan terhadap perekonomian dunia dan kualitas kehidupan secara signifikan. Berbagai hal yang berkaitan dengan produksi bisa lebih efektif. Sebagai contoh, bagaimana kita memanfaatkan *google drive* dan teman-temannya sebagai “mesin” untuk menyimpan data di *cloud*. Teknologi yang memanfaatkan big data, seperti yang dipakai oleh Gojek, Tokopedia, dan lainnya. Demikian pula dengan Tesla, yang berhasil mengembangkan mobil tanpa awak, yang bisa mengantar penumpangnya dengan otomatis. Penemuan printer 3 dimensi yang bisa membuat berbagai macam barang juga mengubah banyak hal di dunia industry.



Gambar 1. Sejarah revolusi industri 1.0 sampai 4.0 (Sumber: kemenperin.go.id)

Pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia Januari 2019, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan pada dunia visi baru negara matahari terbit yaitu *Society 5.0*. Peradaban versi ke-5 ini akan mengintegrasikan ruang fisik dan ruang maya sehingga akan sangat mengandalkan kecanggihan teknologi informasi yang perkembangannya semakin pesat (Kemenperin, 2018).

Dengan pesatnya teknologi *Artificial Intelligence* (AI) maka di Jepang muncul sebuah sikap yang menjelaskan bahwa jika kita terlalu mengedepankan teknologi, tanpa memikirkan sisi manusia, dampaknya bisa bahaya. *Society 5.0 (new society)* dapat dikatakan sebagai pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Pemerintah Jepang menyebut *society 5.0* adalah di mana

ruang maya dan ruang fisik konvergen atau dalam kata lain terintegrasi. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Singkatnya semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi ini juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial.

Sederhananya, kalau revolusi industri 4.0 ini membuat manusia jadi lebih modern karena memiliki akses terhadap teknologi, *society 5.0* adalah masa di mana teknologi-teknologi ini menjadi bagian dari manusia. *Society 5.0* dapat menjadi solusi akan hal di atas, bukan malah menyaingi apa yang sudah ada sebelumnya di masa revolusi industri 4.0. Prinsipnya mendasarkan pada peranan manusia itu sendiri bersama teknologi yang sudah

tercipta, sehingga manusia membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata.

Kemajuan ini dapat kita lihat melalui adanya kemunculan *aplikasi Uber/Gojek/Grab* yang mengancam berbagai layanan jasa taksi konvensional, maupun *Airbnb* yang membuat banyak perusahaan di bidang industri pariwisata harus beradaptasi. Pada era ini juga ditunjukkan, bahwa perusahaan yang ada tidak lagi bersaing atau fokus terhadap jumlah atau hasil produksi yang dibuat, namun persaingan ditunjukkan ke bagaimana setiap perusahaan mampu memberikan inovasi, pelayanan yang maksimal, serta kecepatan sebuah perusahaan dalam mengembangkan sebuah ide.

Pada masa *revolusi industri 4.0 dan society 5.0*, kita dihadapkan pada situasi *disruption*. *Disruption* itu sejatinya mengubah bukan hanya "cara" berbisnis, melainkan juga fundamental bisnisnya. Mulai dari struktur biaya sampai ke budaya, dan bahkan ideologi industri. Pada pilar pembangunan ekonomi, peran perempuan sangat jelas. Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan adalah manajer keuangan, Perempuan dituntut untuk

mampu sebagai pengatur ekonomi keluarga. Kebutuhan primer, sekunder, dan bahkan seluruh kebutuhan ekonomi keluarga diatur oleh perempuan, baik sebagai isteri maupun sebagai ibu. Selain pengatur keuangan rumah tangga, beberapa perempuan juga berperan dalam pencari nafkah bagi keluarganya, baik sebagai pencari nafkah utama ataupun sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2017 menunjukkan, terdapat 131,55 juta orang tersedia dalam pasar tenaga kerja, sedangkan tingkat partisipasi perempuan sekitar 55 persen, lebih rendah dibandingkan laki-laki 83,1 persen (Harian Kompas, 2018). Data *International Finance Corporation* dan *USAID* yang menyebutkan, 47 persen perempuan Indonesia aktif berinternet, tetapi hanya untuk hiburan, seperti menonton video atau mengunggah foto. Bahkan, 32 persen perempuan tidak tahu cara berinternet untuk mencari hal-hal yang mereka butuhkan.

Pasca Perang Dunia II, negara Jepang mengalami bonus demografi sekira tahun 1970-an. Situasi tersebut dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan industri menjadi Negara modern di bidang teknologi hingga saat ini. Demikian juga yang terjadi di Korea Selatan (1990-an) dan China (2000-an). Bonus demografi

merupakan suatu fenomena ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia non-produktif. Negara-negara tersebut telah jeli memanfaatkan penduduk usia produktif terlibat aktif dalam membangun peradaban modern hingga saat ini. Keberhasilan Jepang dan Korea Selatan memanfaatkan bonus demografi tidak lepas dari kesadaran untuk berinvestasi di bidang pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, sarana prasarana yang memadai dalam olah pikir dan karakter sebagai suatu kesatuan.

Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030-an, sehingga harus dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas secara maksimal dari sekarang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pendidikan bagi generasi muda. Namun demikian hal ini tidak mudah dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti masalah kesenjangan sosial, demokratisasi, tindak pidana korupsi, ketergantungan terhadap produk impor, dll.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang, sebagai fondasi pembentukan manusia dan kebudayaan Indonesia, penguatan kemampuan membangun kemajuan serta jalan

mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hingga saat ini bangsa Indonesia sudah mencapai berbagai kemajuan dan juga menghadapi berbagai tantangan baru. Sebagai contoh, tantangan pandemi Covid-19 saat ini berdampak pada aspek kesehatan dan seluruh aktivitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Pandemi Covid-19 benar-benar sedang menguji ketahanan nasional Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan.

Pendidikan menjadi cara yang sangat strategis dan harus dimaknai sebagai suatu proses rekayasa sosial, untuk membudayakan manusia, membuat manusia menjadi berbudaya. Menyadari hal strategis tersebut, tidak mengherankan jika founding fathers meletakkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya mengenai intelektualitas, tetapi juga mengenai kecerdasan dalam seluruh perikehidupan bangsa, kecerdasan dalam hal akhlak, budaya, sosial, ekonomi, berbangsa, dan bernegara

Terkait dengan era revolusi Industri 4.0 pada saat ini, kepemimpinan di era digital merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh individu untuk menciptakan solusi dari berbagai

permasalahan yang ada di era digital. Perlu adanya pendidikan *digital leadership*, yaitu pendidikan yang menekankan individu agar memiliki kemampuan dalam memimpin dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Demikian pula untuk meningkatkan kualitas SDM pada saat Pandemi C-19 diperlukan adanya kemampuan *literasi digital* dan sekaligus *digital awareness*. Tantangan ke depan dalam meningkatkan kualitas SDM di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 adalah SDM yang minimal harus memiliki 1) kemampuan kognitif, 2) *softskill*, dan 3) teknologi.

Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 adalah peluang untuk memperbaiki apa yang salah di era sebelumnya. Hal itu dimulai dengan membangun komitmen bersama untuk masa depan berjuang untuk kebaikan bersama, menjaga martabat manusia, dan bertindak sebagai penata layanan bagi generasi mendatang. Investasi Pendidikan untuk SDM yang berkualitas menjadi hal penting dalam hal ini. Tetapi agar Revolusi Industri 4.0 memiliki peluang, kita menuntut agar tidak ada yang tertinggal dan kita semua perlu menciptakan Society 5.0 yang adil dan setara.

Hadirnya Revolusi Industri 4.0 seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh kaum perempuan

karena memiliki prospek yang menjanjikan bagi posisi perempuan sebagai bagian dari peradaban dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak pada peran perempuan yang semakin kompleks, namun kesenjangan akses dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi antara perempuan dan laki-laki masih cukup besar. Perempuan lebih rentan tergantikan dengan adanya perkembangan teknologi digital, karena mereka biasanya melakukan pekerjaan yang sama berulang kali. Pekerjaan itu biasanya lebih otomatis yang bisa dengan mudah digantikan oleh robot jika dibandingkan pekerjaan lain.

Kefasihan digital kaum perempuan Indonesia masih memprihatinkan. Padahal, kefasihan dibutuhkan guna membantu penyetaraan gender karena memberikan konektivitas dan aksesibilitas bagi perempuan. Kefasihan digital adalah cara seseorang untuk memanfaatkan teknologi untuk menjadi produktif. Misalnya, bagaimana perempuan dapat menggunakan teknologi untuk terlibat dalam *e-commerce*. Penyebab rendahnya kefasihan digital kaum perempuan dinilai akibat mereka masih menggunakan teknologi dan produk digital sebagai konsumen. Perempuan, misalnya, hanya menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Selain itu, kurikulum

pendidikan Indonesia dinyatakan belum beradaptasi dalam era digital saat ini.

Perlu diingat bahwa Indonesia memiliki akar budaya luhur yang tidak layak ditinggalkan begitu saja. Menjadi global memang penting bahkan menjadi tuntutan, tetapi seyogyanya kearifan lokal harus juga dipegang teguh. Berpikir global, bertindak lokal. Sekali lagi, menjadi global untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai warga dunia itu penting, tetapi jangan sampai identitas sebagai bangsa Indonesia terkikis karenanya.

## KESIMPULAN

Revolusi industri 4.0 ini membuat manusia jadi lebih modern karena memiliki akses terhadap teknologi, *society 5.0* adalah masa di mana teknologi-teknologi ini menjadi bagian dari manusia. *Society 5.0* dapat menjadi solusi akan hal di atas, bukan malah menyaingi apa yang sudah ada sebelumnya di masa revolusi industri 4.0. Prinsipnya mendasarkan pada peranan manusia itu sendiri bersama teknologi yang sudah tercipta, sehingga manusia membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Anthony, C., & Patra, F. (2022). Pengembangan Energi Terbarukan dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di PT. Pertamina. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 11(2), 113–122.
- Cop, I. P. (2021). *Kolaborasi Menuju Pembangunan Rendah Karbon*. Jakarta.
- Hidayat, S. I. (2017). Green City : Solusi Problematika Perkotaan Dalam Dimensi Pembangunan. *Green City: Solusi Problematika Perkotaan Dalam Dimensi Pembangunan Berkelanjutan*, 567–576.
- Jayanto, S., Zid, M., & Dewi, Y. S. (2018). *Hubungan antara Tanggung Jawab dan Komitmen dengan Kepemimpinan Lingkungan pada Penerapan Pembangunan Berkelanjutan*. 7(2).
- Kemenperin. (2018). Sejarah revolusi industri 1.0 sampai 4.0.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi: Tujuan Pembangunan*

- Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Manusia, M. H. dan H. A. *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.*, (2017).
- Ramadhan, M. F. S. (2013). Revitalisasi Dimensi Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan di Madura melalui Peran Kiai dan Pesantren. *KAKRSA*, 21(1).
- Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Permodelan Indikator Tujuan Pembanguna Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), 61–74.
- Suswanto, E. (2018). Manajemen Kolaborasi dalam Rangka Pengelolaan Situ Rawa Gede Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan di Kota Bekasi. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 7(1).
- Wahyudi, D., Azwari, P. C., Alfajr, A., & DhitaSeptiani, S. (2018). Sinergitas Organisasi Publik dengan Mengimplementasikan Sukuk Wakaf Melalui Pembentukan Halal Center Industry. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 718–743.
- Wulansari, D., Darumurti, A., & Eldo, D. H. A. P. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3), 407–421. <https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.433>
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat*. Rawamangun, Jakarta: Kencana.